

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Konseptual

Deskripsi konseptual menjelaskan bagian dari laporan penelitian yang berisi tentang penjelasan tentang teori yang relevan dengan tema penelitian dan menjelaskan tentang variabel pada penelitian ini, yang dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1 Teori Agensi

Teori Agensi adalah hubungan keagenan terjadi ketika satu atau lebih prinsipal mempekerjakan seorang agen untuk membantu menjalankan bisnis dan prinsipal memberikan atau memberikan hak kepada agen untuk mengambil keputusan (Jensen & Meckling, 1976). Hubungan keagenan terbentuk ketika lebih dari satu orang bekerja sama dengan orang yang berbeda untuk memberikan layanan dan kemudian menyerahkan keputusan kepada agen (Khairunnisa & Sulfitri, 2024). Untuk mengelola operasional perusahaan dan menghasilkan keuntungan, direksi memerlukan agen berupa jasa. keuntungan yang terbaik sesuai dengan tujuan prinsipal (Zahwa et al., 2023).

2.1.2 Teori Stakeholder

Teori stakeholder mengungkapkan bahwa perusahaan tidak hanya menghasilkan keuntungan tetapi memiliki kepedulian terhadap lingkungan disekitarnya (Freeman, 1984). Tujuan utama dari teori stakeholder adalah untuk membantu manajer korporasi mengerti lingkungan stakeholder mereka dan melakukan pengelolaan dengan lebih efektif di antara keberadaan hubungan-hubungan di lingkungan perusahaan mereka. Namun demikian, tujuan yang

lebih luas dari teori stakeholder adalah untuk menolong manajer korporasi dalam meningkatkan nilai dari dampak aktifitas mereka, dan meminimalkan kerugian bagi stakeholder (Klofilida Suryati et al., 2019).

2.1.3 Teori Kontingensi

Menurut Otley, (1980) kepemimpinan yang efektif tidak hanya bergantung pada gaya kepemimpinan tetapi juga pada pengendalian situasi. Perusahaan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda tergantung gaya kepemimpinan dan kondisi lingkungan yang dihadapi masing-masing perusahaan (Handayani, 2020; Etika dkk., 2022; Natalia, 2023). Adanya teori kontingensi menunjukkan adanya pandangan bahwa terdapat variabel lain yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen (Lesmana dan Kesaulya, 2022).

2.1.4 Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan diukur dari nilai saham yang dikeluarkan di pasar. Proyeksi arus kas untuk tahun ini dan masa depan menentukan harga saham (Afifah et al., 2021). Nilai perusahaan adalah nilai jual suatu perusahaan sebagai bisnis yang beroperasi. Nilai organisasi pengelola yang mengelola perusahaan menjadi alasan mengapa nilai jual lebih besar dari nilai likuidasi (Maghfirah et al., 2023).

Nilai suatu perusahaan dapat diukur dari harga yang bersedia dibayar investor untuk membeli sahamnya. Semakin tinggi harga yang dibayarkan investor maka semakin tinggi nilai perusahaan (Wahyudin dkk., 2020). Nilai

perusahaan biasanya diproyeksikan melalui harga saham di pasar modal. Harga saham selalu berubah tergantung informasi yang diberikan perusahaan dan bagaimana pasar menyikapi informasi tersebut (Rasyid dkk., 2022). Nilai perusahaan dapat meningkat sehingga pemegang saham memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari perusahaan. Oleh karena itu, semakin tinggi harga saham maka semakin besar keuntungan bagi pemegang saham. Oleh karena itu, keadaan ini menarik bagi investor karena nilai perusahaan meningkat seiring dengan permintaan saham (Silkfan & Azwir, 2022). Rumus Tobin's Q yang digunakan pada penelitian ini adalah:

$$\text{Tobin's Q} = \frac{MVE + DEBT}{\text{Total Aset}}$$

Keterangan:

Tobin's Q : Nilai Perusahaan

MVE : Market value of equity (closing price x jumlah saham beredar)

Debt : Total hutang (kewajiban lancar-asset lancar + hutang jangka panjang)

TA : Nilai buku dari total aset

2.1.5 Good Corporate Governance

GCG dapat diartikan sebagai suatu sistem pengaturan dan pengendalian perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan keberlanjutan perusahaan. GCG dapat dilihat melalui mekanisme hubungan antara pihak-pihak yang mengelola perusahaan atau nilai-nilai yang terkandung dalam pengelolaan perusahaan.

GCG dapat meningkatkan kinerja usaha, menjaga keberlangsungan usaha, meningkatkan kepercayaan investor, memberikan informasi yang lebih baik kepada masyarakat, serta menciptakan transaksi yang mandiri dan adil. Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan topik yang mempunyai banyak segi. Salah satu topik utamanya adalah akuntabilitas dan tanggung jawab mandat, khususnya penerapan standar dan prosedur untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. Fokus utama lainnya adalah efisiensi ekonomi, yang menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan harus bertujuan untuk mengoptimalkan hasil ekonomi dengan penekanan kuat pada kesejahteraan pemegang saham. Ada pula sisi lain dari tata kelola perusahaan, seperti perspektif pemangku kepentingan (stakeholder), yang menuntut perhatian dan akuntabilitas lebih besar terhadap pihak selain pemegang saham, seperti karyawan.

Prinsip dasar GCG meliputi:

1. **Transparansi (Transparency):** Menjamin adanya keterbukaan informasi yang relevan dan Mudah di akses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
2. **Akuntabilitas (Accountability):** Menegaskan tanggung jawab yang jelas pada setiap tingkatan organisasi untuk menjalankan tugas sesuai dengan peran masing-masing.
3. **Tanggung Jawab (Responsibility):** Memastikan perusahaan mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku, serta melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan.

4. Kemandirian (Independency): Mencegah pengaruh atau dominasi pihak tertentu dalam pengambilan keputusan sehingga tetap objektif.
5. Keadilan (Fairness): Menjamin adanya perlakuan yang adil bagi semua pemangku kepentingan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.

GCG yang baik membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja, meminimalkan risiko, menciptakan reputasi yang positif, serta memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan bisnis. GCG juga menjadi kerangka kerja untuk mengelola konflik kepentingan, menciptakan nilai tambah bagi perusahaan, dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan. GCG dalam penelitian ini menggunakan variabel dewan komisaris independent dan komite audit.

GCG memerlukan komitmen yang kuat untuk mewujudkannya. Investor sangat memperhatikan penerapan GCG dalam mengambil keputusan investasi. GCG akan meyakinkan investor bahwa perusahaan telah dikelola dengan baik oleh manajemen demi kelangsungan hidup dan kepuasan pemegang saham (Sucipto, 2020; Setiadi, 2020; Kemala Dewi et al., 2021). Definisi operasional dan pengukuran variabel:

2.1.5.1 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh manajer atau pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Dalam konteks ini, manajer tidak hanya bertindak sebagai pengelola perusahaan tetapi juga sebagai pemilik (pemegang saham), sehingga mereka memiliki dorongan untuk meningkatkan kinerja perusahaan demi keuntungan pribadi mereka sebagai

pemegang saham. Tingginya tingkat kepemilikan saham perusahaan dalam hal ekonominya akan menjadi insentif untuk menyelaraskan kepentingan principal. Untuk menghitung kepemilikan manajerial menggunakan rumus menurut (Widyawati, 2020) yaitu:

$$KM = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki manajemen}}{\text{Jumlah yang diterbitkan}}$$

Keterangan :

DKI = kepemilikan manajerial

2.1.5.2 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, reksa dana, atau dana lindung nilai. Tidak seperti kepemilikan individu, kepemilikan institusional biasanya melibatkan sejumlah besar saham, sehingga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan perusahaan. Dengan adanya kepemilikan institusional pada perusahaan, maka pengawasan terhadap investasi yang dilakukan dapat dilakukan secara efisien, sehingga pengendalian yang tinggi terhadap manajemen akan meminimalisir terjadinya kecurangan. Kepemilikan institusional dihitung dengan menggunakan rumus menurut (Ekonomi dkk., 2024) yaitu:

$$KI = \frac{\text{Jumlah saham pihak intitusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

Keterangan :

DKI = komisar is indevenden

2.1.5.3 Dewan Komisaris Komisaris Independen

Dewan Komisaris merupakan organ dalam perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan operasional perusahaan. Dewan Komisaris berperan dalam memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dewan komisaris independen yaitu dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan bagian keuangan perusahaan. Dalam penelitian ini, dewan komisaris independen dihitung dengan menggunakan rumus menurut (Cindy dkk., 2024) yaitu:

$$DKI = \frac{\text{Jumlah Anggota DKI}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}} \times 100$$

Keterangan :

DKI = Dewan komisaris indevidenden

2.1.5.4 Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu dalam mengawasi proses pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, audit, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Komite ini berperan penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Komite audit, merupakan sejumlah orang yang telah ditentukan oleh dewan komisaris yang memiliki tanggungjawab memantau proses penyusunan laporan keuangan dan pengungkapannya. Untuk menghitung komite audit menurut (Suharto dkk., 2022) yaitu:

$$KA = \frac{\text{Komisaris independen dalam komite audit}}{\text{Total komite audit}}$$

Keterangan :

DKI = komite audit

2.1.5.5 Ukuran KAP

Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan lembaga atau badan usaha yang memberikan jasa audit dan konsultasi keuangan yang dilakukan oleh Akuntan Publik. KAP memiliki peran penting dalam memastikan transparansi, keakuratan, dan kepatuhan laporan keuangan perusahaan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Audit merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengurangi inkonsistensi antara principal dan agent dengan menggunakan pihak eksternal untuk memberikan validasi atas laporan keuangan. Pemilihan auditor eksternal yang tepat dengan melihat besar kecilnya KAP tentu akan menjamin independensi dan profesionalitas auditor (Widyawati, 2020). Dalam konteks penelitian atau analisis data, variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk mengkategorikan data ke dalam kelompok tertentu, biasanya dengan nilai 0 atau 1. Untuk menghitung ukuran KAP yang digunakan adalah variabel dummy, 0=perusahaan yang tidak berafiliasi *Big Four*. 1. 0=perusahaan yang berafiliasi *Big Four*.

Pengukuran gcg yang digunakan penelitian ini adalah Dewan Komisaris Independen.

2.1.6 *Corporate Social Responsibility*

CSR adalah manajer bertanggung jawab atas segala keputusan dan kegiatan usaha perusahaan, maka perusahaan tetap mempunyai tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab moral. Setiap pekerja memikul tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab moral terhadap perusahaannya. Karyawan mempunyai tanggung jawab sosial atas nama perusahaan selama mereka bekerja dan terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan (Halmawati, 2022; Yusmaniarti dkk., 2023; Sulfitri, 2024).

CSR menurut Riswanto, (2023), suatu jenis kerjasama perusahaan dengan pemangku kepentingan yang berinteraksi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup perusahaan. Bisnis yang mempertimbangkan tanggung jawab sosial perusahaan mempertimbangkan lingkungan sosial perusahaan, bukan hanya keuntungan moneter.

CSR adalah sebuah konsep hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dituntut untuk proaktif memprioritaskan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan memaknai CSR sebagai komitmen industri untuk mempertanggungjawabkan implikasi operasionalnya pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta memastikan bahwa dampak tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat. manfaat positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar (Soedarman et al., 2024).

Menurut Rahardja, (2022) CSR adalah memberikan informasi tambahan mengenai aktivitas perusahaan. Hal ini tentunya berkaitan dengan strategi

pemasaran perusahaan yang bertujuan untuk mempromosikan perusahaan dan menciptakan citra positif di mata masyarakat. Jika perusahaan terbuka dalam melaksanakan kegiatan CSR berkelanjutan, maka perusahaan akan menjadi sinyal baik bagi masyarakat, dan pasar akan menilai nilai saham perusahaan yang peduli terhadap kegiatannya.

Metode yang digunakan untuk mengetahui nilai pengungkapan CSR dengan GRI-G4 dilakukan dengan membandingkan laporan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup perusahaan. Dalam laporan tahunannya serta laporan keberlanjutan perusahaan dengan indeks standar GRI-G4. Cara yang digunakan adalah dengan memberikan nilai 1 apabila perusahaan mengungkapkan suatu item pengungkapan CSR berdasarkan indikator GRI-G4 dan memberikan nilai 0 bagi perusahaan yang tidak mengungkapkan CSR berdasarkan indikator GRI-G4. Kemudian poin pengungkapan tersebut dijumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah item indikator yaitu 91 sehingga diperoleh angka rasio pengungkapan CSR. Jika perusahaan mengungkapkan secara lengkap kegiatan CSR maka nilai maksimum yang dicapai adalah 1, dan nilai minimum pengungkapan CSR adalah 0,01 (Juliana dkk., 2020; Anwar dkk., 2021; Shofiani dkk., 2022; Leonardo dan Ratmono, 2023). Rumus pengungkapan CSR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CSR = \frac{\text{Jumlah kriteria GRI yang diungkapkan}}{91 \text{ kriteria}}$$

Keterangan :

CSR = *Corporate Social Responsibility*

Kriteria Pengungkapan CSR Berdasarkan GRI 4 Di Ungkapkan Di Bawah Ini:

NO	KODE	INDIKATOR
KATEGORI: EKONOMI		
Aspek: Kinerja Ekonomi		
1	EC 1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan.
2	EC 2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi karena perusahaan iklim
3	EC 3	Cakupan kewajiban organisasi atas program imbalan pasti
4	EC 4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah
Aspek: Keberadaan Pasar		
5	EC 5	Rasio upah standar pegawai pemula (entry level) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di Lokasi-lokasi operasional yang signifikan
6	EC 6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari Masyarakat lokal di Lokasi operasi yang signifikan
Aspek: Dampak Ekonomi Tidak Langsung		
7	EC 7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan
8	EC 8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak
Aspek: Praktik Pengadaan		
9	EC 9	Perbandingan pembelian dari pemasok lokal di Lokasi operasional yang signifikan
KATEGORI: LINGKUNGAN		
Aspek: Bahan		
10	EN 1	Bahan yang digunakan berdasarkan bobot atau volume
11	EN 2	Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang
12	EN 3	Konsumsi energi dalam organisasi
13	EN 4	Konsumsi energi di luar organisasi
14	EN 5	Intensitas energi
15	EN 6	Pengurangan konsumsi energy
16	EN 7	Pengurangan kebutuhan energi pada produk dan jasa
Aspek: Air		
17	EN 8	Total pengambilan air berdasarkan sumber
18	EN 9	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air
19	EN 10	Persentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan Kembali
Aspek: Keanekaragaman Hayati		
20	EN 11	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa dan dikelola di dalam, atau yang berdekatan dengan kawasan lindung dan

		Kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar Kawasan lindung
21	EN 12	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati di Kawasan lindung dan Kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar Kawasan lindung
22	EN 13	Habitat yang dilindungi atau dipulihkan
23	EN 14	Jumlah total spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan Tingkat risiko kepunahan
Aspek: Emisi		
24	EN 15	Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (cakupan 1)
25	EN 16	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung (cakupan 2)
26	EN 17	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (cakupan 3)
27	EN 18	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)
28	EN 19	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK)
29	EN 20	Emisi bahan perusak ozon (BPO)
30	EN 21	NO _x , SO _x , dan emisi udara signifikan lainnya
Aspek: Efluen dan Limbah		
31	EN 22	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan
32	EN 23	Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
33	EN 24	Jumlah dan volume total tumpahan signifikan
34	EN 25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi Basel Lampiran I, II, III, dan VII yang diangkut untuk pengiriman internasional
35	EN 26	Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak dari pembuangan air limpasan dari organisasi
Aspek: Produk dan Jasa		
36	EN 27	Tingkat mitigasi dampak terhadap lingkungan produk dan jasa
37	EN 28	Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasikan menurut kategori
Aspek: Kepatuhan		
38	EN 29	Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan
Aspek: Transportasi		
39	EN 30	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi dan pengangkutan tenaga kerja
Aspek: Lain-lain		
40	EN 31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis

Aspek: Asesmen Pemasok atas Lingkungan		
41	EN 32	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan
42	EN 33	Dampak lingkungan negatif signifikan actual dan potensial dalam rantai pasokan dan Tindakan yang diambil
Aspek: Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan		
43	EN 34	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
KATEGORI: SOSIAL		
Sub-Kategori; Praktik Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja		
Aspek: Kepegawaian		
44	LA 1	Jumlah total dan Tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan menurut kelompok umur, <i>gender</i> , dan wilayah
45	LA 2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purna waktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu, berdasarkan Lokasi operasi yang signifikan
46	LA 3	Tingkat Kembali bekerja dan Tingkat retensi setelah cuti melahirkan, menurut <i>gender</i>
Aspek: Hubungan Industrial		
47	LA 4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama
Aspek: Kesehatan dan Keselamatan Kerja		
48	LA 5	Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite Bersama formal manajemen pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja
49	LA 6	Jenis dan Tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang, dan kemangkiran, serta jumlah total kematian akibat kerja menurut daerah dan <i>gender</i>
50	LA 7	Pekerja yang sering terkena atau berisiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka
51	LA 8	Topik Kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja
Aspek: Pelatihan dan Pendidikan		
52	LA 9	Jam pelatihan rata-rata pertahun per karyawan menurut <i>gender</i> , dan menurut kategori karyawan
53	LA 10	Program untuk manajemen ketrampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti
54	LA 11	Persentase karyawan yang menerima review kinerja dan pengembangan karier secara regular, menurut <i>gender</i> dan kategori karyawan
Aspek: Keberagaman dan Kesetaraan Peluang		

55	LA 12	Komposisi badan tata Kelola dan pembagian karyawan perkategori karyawan menurut <i>gender</i> , kelompok usia keanggotaan kelompok minoritas, dan indicator keberagaman lainnya
Aspek: Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki		
56	LA 13	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi Perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, berdasarkan Lokasi operasional yang signifikan
Aspek: Asesmen Pemasok atas Praktik Ketenagakerjaan		
57	LA 14	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan
58	LA 15	Dampak negative actual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan dalam rantai pasokan dan Tindakan yang diambil
Aspek: Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan		
59	LA 16	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
Sub-Kategori: Hak Asasi Manusia		
Aspek: Investasi		
60	HR 1	Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia
61	HR 2	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi termasuk persentase karyawan yang dilatih
Aspek: Non-Diskriminasi		
62	HR 3	Jumlah total insiden diskriminasi dan Tindakan korektif yang diambil
Aspek: Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Sama		
63	HR 4	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi untuk melatih kebebasan dari asosiasi dan collective bargaining dalam risiko yang signifikan dan aksi yang diambil untuk mendukung hal tersebut
Aspek: Pekerja Anak		
64	HR 5	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan Tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif
Aspek: Pekerja atau Wajib Kerja		
65	HR 6	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan Tindakan untuk

		berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja
	Aspek: Praktik Pengamanan	
66	HR 7	Persentase petugas pengaman yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia di organisasi yang relevan dengan operasi
	Aspek: Hak Adat	
67	HR 8	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak Masyarakat adat dan Tindakan yang diambil
	Aspek: Asesmen	
68	HR 9	Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan review atau asesmen dampak hak asasi manusia
	Aspek: Asesmen Pemasok atas Hak Asasi Manusia	
69	HR 10	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia
70	HR 11	Dampak negative actual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pasokan dan Tindakan yang diambil
	Aspek: Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia	
71	HR 12	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal
	Sub-Kategori: Masyarakat	
	Aspek: Masyarakat Lokal	
72	SO 1	Persentase operasi dengan pelibatan Masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program pengembangan yang diterapkan
73	SO 2	Operasi dengan dampak negative actual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat
	Aspek: Anti-Korupsi	
74	SO 3	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi
75	SO 4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi
76	SO 5	Insiden korupsi yang terbukti dan Tindakan yang diambil
	Aspek: Kebijakan Publik	
77	SO 6	Nilai total kontribusipolitik berdasarkan negara dan penerima/penerima manfaat
	Aspek: Anti-Persaingan	
78	SO 7	Jumlah total Tindakan hukum terkait anti-persaingan, anti-trust, serta praktik monopoli dan hasilnya
	Aspek: Kepatuhan	
79	SO 8	Nilai monitor denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan

		peraturan
	Aspek: Asesmen Pemasok atas Dampak pada Masyarakat	
80	SO 9	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria untuk dampak terhadap Masyarakat
81	SO 10	Dampak negative actual dan potensial yang signifikan terhadap Masyarakat dalam rantai pasokan dan Tindakan
	Aspek: Mekanisme Pengaduan Dampak terhadap Masyarakat	
82	SO 11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap Masyarakat yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
	Sub-Kategori: Tanggung Jawab atas Produk	
	Aspek: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan	
83	PR 1	Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampaknya terhadap Kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan
84	PR 2	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak Kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis hasil
	Aspek: Pelabelan Produk dan jasa	
85	PR 3	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta persentase kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis
86	PR 4	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa menurut hasil
87	PR 5	Hasil survey untuk mengukur kepuasan pelanggan
	Aspek: Komunikasi Pemasaran	
88	PR 6	Penjualan produk yang dilarang atau sengketaan
89	PR 7	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor, menurut jenis hasil.
	Aspek: Privasi Pelanggan	
90	PR 8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data
	Aspek: Kepatuhan	
91	PR 9	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk jasa

2.1.7 Ukuran Perusahaan

Menurut Irkhami, (2021) ukuran perusahaan merupakan gambaran tentang kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, yang dapat digambarkan dari total aset, total penjualan, laba, beban pajak, dan faktor lainnya. Total penjualan bersih, yang merupakan faktor rata-rata total penjualan bersih pada tahun yang bersangkutan, merupakan cara lain untuk menentukan besar kecilnya suatu perusahaan. Indikator ini menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai kekuatan finansial. Perusahaan harus mempunyai modal yang lebih besar karena ukurannya yang besar. “Ukuran perusahaan”, bisnis diklasifikasikan menurut ukurannya berdasarkan sejumlah variabel, termasuk total aset, penjualan, nilai saham, dan variabel lainnya (Khafid, 2020; Irkhami, 2021; Halmawati, 2022; Maghfirah dkk., 2023; Sulfitri, 2024). Ukuran perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln(\text{total asset})$$

2.2 Hasil Penelitian Relapan

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya, yang digunakan sebagai bahan pertimbangan permasalahan penelitian. Beberapa pencarian tersebut akan dimasukkan dalam tabel dibawah ini:

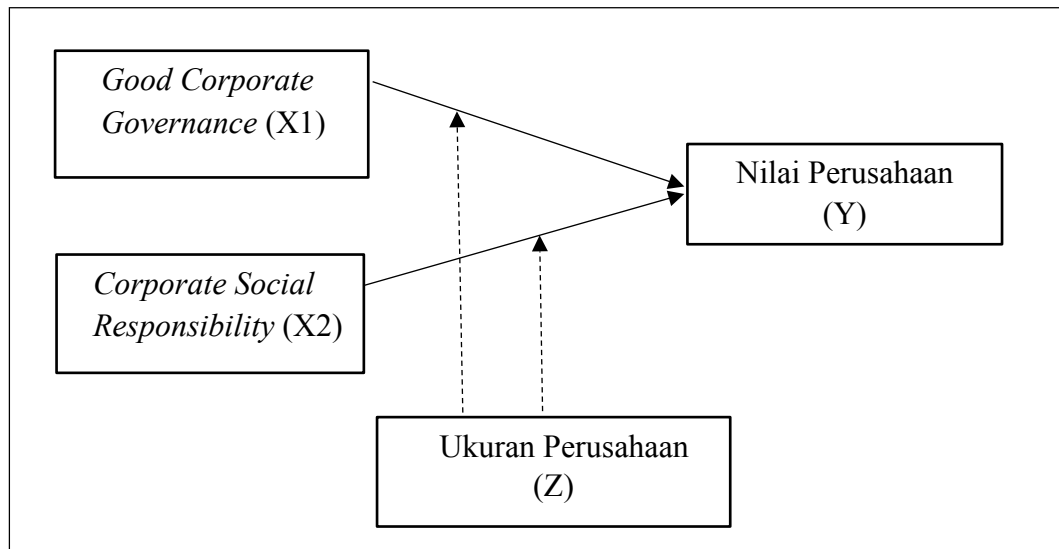
Tabel 2.1
Hasil Penelitian yang Relevan

No	Penulis	Judul	Metode penelitian	Hasil
1	(Susetyowati & Handayan	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> ,	Kuantitatif	Komite Audit dan Leverage tidak berpengaruh terhadap

	i, 2020).	Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan.		Nilai Perusahaan. Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan (Handayani, 2020).
2	(Purwanto, 2021).	Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) dan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Nilai Perusahaan.	Kuantitatif	<i>Good Corporate Governance</i> (GCG) berpengaruh signifikan nilai perusahaan. <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) secara signifikan mempengaruhi nilai perusahaan (Purwanto, 2021).
3	(Otoxsusilo et al., 2023).	The Effect of Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, and Capital Structure on Firm Value with Profitability as an Intervening Variable in Banking Companies.	Kuantitatif	Good Corporate Governance (GCG) berpengaruh positif yang tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh positif yang tidak signifikan terhadap nilai perusahaan Otoxsusilo et al., 2023).
4	Haisyah et al., (2024).	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Pengungkapan	Kuantitatif	Good Corporate Governance (GCG) berpengaruh tidak signifikan dan negatif

		<i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Nilai Perusahaan Sektor Pertambangan, International Journal of Community Service & Engagement e-ISSN.		terhadap nilai perusahaan. Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh signifikan namun koefisiennya negatif terhadap nilai perusahaan. Good Corporate Governance (GCG) dan Corporate Social Responsibility (CSR) secara simultan berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai perusahaan (Haisyah et al., 2024).
--	--	--	--	--

2.3 Kerangka Konseptual



Penelitian ini membahas mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi nilai perusahaan dan mengetahui seberapa besar variabel x terhadap minat nilai perusahaan. Variabel yang mempengaruhi dalam penelitian ini adalah GCG dan CSR terhadap nilai perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai moderasi. Kerangka pemikiran ini disusun berdasarkan hipotesis yang diambil dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran yang digunakan seperti yang ada dalam gambar dibawah ini.

Keterangan:

X1 : Dewan Komisaris Devenden

X2 : *Corporate Social Responsibility*

Y : Nilai Perusahaan

Z : Ukuran Perusahaan

—————> : Pengaruh Langsung

- - - - -> : Pengaruh Tidak Langsung

2.4 Definisi oprasional

Definisi Operasional adalah untuk mendefinisikan secara operasional variabel-variabel yang akan diteliti, meliputi: definisi, metode pengukuran dan alat ukur yang digunakan. Berikut adalah definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 2.4.1
Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala	Sumber
1.	GCG	Dewan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama, Direksi, atau pihak lain yang dapat memengaruhi independensinya dalam menjalankan tugas pengawasan dan pengambilan keputusan	$DKI = \frac{\text{Jumlah Anggota DKI}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}} \times 100$	Rasio	(Ekonomi dkk., 2024)
2.	Corporate Social Responsibility	CSR adalah suatu konsep di mana perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar operasional bisnisnya	$CSR = \frac{\text{Jumlah kriteria GRI yang diungkapkan}}{91 \text{ Kriteria}}$	Rasio	(Safaruddin dkk., 2023)
3.	Nilai perusahaan	Nilai Perusahaan adalah ukuran yang mencerminkan total nilai ekonomi suatu perusahaan, baik dari segi aset, kinerja keuangan, prospek pertumbuhan, maupun reputasi di pasar	$\text{Tobin's Q} = \frac{MVE + DEBT}{TA}$	Rasio	(Irmalsari dkk., 2022)
4.	Ukuran perusahaan	Ukuran Perusahaan adalah suatu indikator yang menggambarkan besar atau kecilnya suatu perusahaan berdasarkan berbagai aspek seperti total aset, pendapatan, jumlah karyawan, atau nilai pasar	$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln(\text{total asset})$	Rasio	(Handayani, 2020)

2.5 Hipotesis

Hipotesis atau dugaan dibuat untuk menjelaskan sesuatu dan perlu diuji kebenarannya. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap ungkapan pertanyaan penelitian, dimana ungkapan pertanyaan penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya. Alasan dikatakan bersifat sementara karena jawaban yang diberikan hanya berdasarkan teori yang relevan, bukan berdasarkan fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data. Pengujian hipotesis dirancang untuk mengetahui korelasi antara dua variabel yang diteliti.

2.5.1 Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap nilai perusahaan

GCG merupakan suatu sistem dan struktur pengelolaan suatu perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham dan mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan seperti kreditur, pemasok, asosiasi pengusaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas. Perusahaan menerapkan GCG yang efektif dan efisien di tengah pandemi saat ini. Apabila suatu perusahaan menerapkan GCG maka diharapkan perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien, begitu pula sebaliknya. Penerapan GCG yang optimal, perusahaan diharapkan dapat memperbaiki kualitas manajemen, mengurangi konflik kepentingan, dan mendorong praktik bisnis yang lebih etis dan bertanggung jawab (Riset dkk., 2024). Hasil peneliti yang menguji GCG yang menghasilkan temuan berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Setiadi, 2020; Limantara dkk., 2021; Sulfitri, 2023).

Teori Agensi adalah hubungan keagenan terjadi ketika satu atau lebih prinsipal mempekerjakan seorang agen untuk membantu menjalankan bisnis dan prinsipal memberikan atau memberikan hak kepada agen untuk mengambil keputusan (Jensen & Meckling, 1976). Hubungan keagenan terbentuk ketika lebih dari satu orang bekerja sama dengan orang yang berbeda untuk memberikan layanan dan kemudian menyerahkan keputusan kepada agen (Khairunnisa & Sulfitri, 2024). Untuk mengelola operasional perusahaan dan menghasilkan keuntungan, direksi memerlukan agen berupa jasa. keuntungan yang terbaik sesuai dengan tujuan prinsipal (Zahwa et al., 2023).

Penelitian Alkhairani dkk., (2020), penunjukan bahwa GCG berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Cholifah, 2020.; Sulfitri, 2023). Hasil penelitian ini mengindikasikan GCG yang dilakukan perusahaan dapat meningkatkan Nilai Perusahaan. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1 : *Good Corporate Governance* Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan

2.5.2 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap nilai perusahaan

CSR merupakan suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh suatu perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap lingkungan sosial atau lingkungan sekitar dimana perusahaan berada. Sedangkan definisi CSR menurut World Business Council on Sustainable Development adalah komitmen dunia usaha perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat luas (Susanto &

Indrabudiman, 2023). Hasil peneliti yang menguji CSR yang menghasilkan temuan berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Setiadi, 2020; Alkhairani dkk., 2020; Afifah dkk., 2021; Prajawati, 2022; Herandianto, 2023).

Teori stakeholder mengungkapkan bahwa perusahaan tidak hanya menghasilkan keuntungan tetapi memiliki kepedulian terhadap lingkungan disekitarnya (Freeman, 1984). Tujuan utama dari teori stakeholder adalah untuk membantu manajer korporasi mengerti lingkungan stakeholder mereka dan melakukan pengelolaan dengan lebih efektif di antara keberadaan hubungan-hubungan di lingkungan perusahaan mereka. Namun demikian, tujuan yang lebih luas dari teori stakeholder adalah untuk menolong manajer korporasi dalam meningkatkan nilai dari dampak aktifitas mereka, dan meminimalkan kerugian bagi stakeholder (Klofilida Suryati et al., 2019).

Penelitian Rahmantari, (2021), Penujukan bahwa CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Apriliani et al., 2023). Hasil penelitian ini mengindikasikan CSR yang dilakukan perusahaan dapat meningkatkan Nilai Perusahaan. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2 : *Corporate Social Responsibility* Berpengaru Terhadap Nilai Perusahaan

2.5.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Dapat Memoderasi *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan.

Ukuran perusahaan adalah seberapa besar atau kecilnya suatu perusahaan dilihat dari jumlah ekuitas, penjualan dan total aset perusahaan (Hidayati & Retnani, 2020; Wardhani et al., 2021; Fajriah et al., 2022). Ukuran perusahaan

merupakan salah satu variabel penentu nilai perusahaan seiring dengan bertambahnya ukuran perusahaan suatu perusahaan, maka aset yang dimiliki semakin besar dan memerlukan dana yang semakin besar lebih untuk mempertahankan aktivitas operasional (Putri & Utomo, 2021).

Ukuran perusahaan dapat menjadi moderator yang memperkuat atau memperlemah pengaruh Tata Kelola Perusahaan yang Baik terhadap nilai perusahaan. Pada perusahaan besar, GCG cenderung lebih efektif dalam meningkatkan nilai perusahaan karena adanya transparansi, akses pasar yang luas, dan tingkat kepercayaan investor yang lebih tinggi (Riset dkk., 2024).

Teori kontingensi mengungkapkan bahwa strategi yang diterapkan oleh perusahaan belum tentu bisa digunakan untuk perusahaan yang lain (Otley, 1980). Adanya teori kontingensi menunjukkan adanya variabel lain yang dapat memperkuat atau memperkuat hubungan antara variabel independen dan dependen (Lesmana dan Kesaulya, 2022).

Penelitian Retno & Priantinah, (2024), menunjukan bahwa ukuran perusahaan dapat memoderasi GCG terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini mengindikasikan ukuran perusahaan mampu memoderasi GCG terhadap nilai perusahaan. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3 : Ukuran perusahaan dapat memoderasi *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan

2.5.4 Pengaruh ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap nilai perusahaan.

Ukuran perusahaan, yang sering kali tercermin dalam aset, jumlah karyawan, pendapatan, dan pasar yang dilayani, mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melaksanakan CSR secara lebih luas dan efektif. Besar kecilnya perusahaan memberi keuntungan dalam hal sumber daya keuangan yang tersedia untuk melaksanakan inisiatif CSR (Kinanti & Murwaningsari, 2022).

Perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar, pengaruh pasar yang lebih luas, dan akses yang lebih baik terhadap investasi dan pembiayaan, yang memungkinkan implementasi CSR yang lebih efektif dan dampak yang lebih signifikan terhadap nilai perusahaan (Loekito & Setiawati, 2021).

Teori kontingensi mengungkapkan bahwa strategi yang diterapkan oleh perusahaan belum tentu bisa digunakan untuk perusahaan yang lain (Otley, 1980). Adanya teori kontingensi menunjukkan adanya variabel lain yang dapat memperkuat atau memperkuat hubungan antara variabel independen dan dependen (Lesmana dan Kesaulya, 2022).

Penelitian Rahmantari, (2021), Penujukan bahwa ukuran perusahaan dapat memoderasi CSR terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini mengindikasikan ukuran perusahaan mampu memoderasi CSR terhadap nilai perusahaan. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Berdasarkan uraian tersebut hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H4 : Ukuran Perusahaan Dapat Memoderasi *Corporate Social Responsibility*

Terhadap Nilai Perusahaan